

OPTIMALISASI PERAN BALAI PENYULUH PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN DI KABUPATEN BEKASI

Pipit Septi Fitriyanti¹, Rizky Afnan Fadillah², Fauziah³

INFO NASKAH

RIWAYAT NASKAH :

Diterima September 2024

Diterima setelah revisi Oktober 2024

Terbit Desember 2024

KEYWORDS :

Agricultural extension

Agricultural infrastructure

ABSTRACT

Implementation of the roles and functions of BPP with the strengthening of BPP as a data and information center, a movement development center, a learning center, an agribusiness consulting center, and a partnership network development center. However, there are challenges in the agricultural sector in Bekasi Regency, namely the decreasing amount of agricultural land, population growth, land use change for agriculture, the growth of new housing, and others. Therefore, a study on the Optimization of the Role of Agricultural Extension Centers in Agricultural Development in Bekasi Regency is needed. This study uses a mixed methods approach, both quantitative and qualitative, and a participatory approach is used to obtain facts and problems as well as priority development sequences and input from various stakeholders to complement the analysis results. Agricultural Extension Centers in carrying out their roles and functions have several problems, these include inadequate facilities and infrastructure, insufficient Human Resources (HR) to effectively conduct extension activities, and budgetary constraints that hinder the execution of programs and the lack of budget in agricultural extension activities. The government must pay more attention to agricultural extension programs throughout Bekasi Regency, the role of extension workers in carrying out activities must be continuous, the things that should be the focus of development include facilities and infrastructure, Human Resources (HR), capacity building of agricultural extension workers, and costs or budgets as optimization of Agricultural Extension Centers in the development of Bekasi Regency.

ABSTRAK

Implementasi peran dan fungsi BPP dengan penguatan peran BPP sebagai pusat data informasi, pusat gerakan pembangunan, pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis, dan pusat pengembangan jejaring kemitraan akan tetapi terdapat tantangan pada sektor pertanian di Kabupaten Bekasi yaitu berkurangnya lahan pertanian, pertumbuhan penduduk, alih fungsi lahan pertanian, tumbuhnya perumahan baru dan lainnya. Untuk itu perlu adanya Kajian Optimalisasi Peran Balai Penyuluh Pertanian dalam Pembangunan Pertanian di Kabupaten Bekasi. Kajian ini menggunakan metode mix metodhs berupa metode kuantitatif dan kualitatif, dan Pendekatan participatory digunakan untuk memperoleh fakta dan permasalahan serta urutan prioritas pengembangan dan masukan-masukan dari berbagai stakeholders untuk melengkapi hasil analisis. Balai Penyuluh Pertanian dalam menjalankan peran dan fungsinya terdapat beberapa permasalahan yaitu diantaranya kurangnya sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai untuk melaksanakan kegiatan penyuluh secara efektif, dan keterbatasan anggaran yang menghambat pelaksanaan program. Pemerintah harus lebih memperhatikan program penyuluh pertanian di seluruh Kabupaten Bekasi, peran penyuluh dalam melakukan kegiatan harus bersifat kontinuitas, hal-hal yang harus yang menjadi fokus pengembangan diantaranya sarana dan prasaran, Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dan biaya atau anggaran sebagai optimalisasi Balai Penyuluh Pertanian dalam pembangunan daerah Kabupaten Bekasi.

Kata kunci: *Penyuluh Pertanian, Sarana, Prasarana*

1. PENDAHULUAN

Penyuluhan pertanian merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem subsistem yang bekerja secara sinergis dan berkesinambungan sehingga tujuan penyuluhan tercapai. Salah satu subsistem utama penyuluhan pertanian adalah kelembagaan penyuluhan, diantaranya yaitu Balai

¹Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bekasi, (email : pipitsepti9@gmail.com)

²Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bekasi, (email : twinkholic@gmail.com)

³Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bekasi

Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat Kecamatan/distrik. BPP memiliki peran strategis karena berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03/ Permentan/SM.200/ 1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, BPP merupakan pos simpul koordinasi (posko) pembangunan pertanian berbasis kawasan. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah tempat pertemuan dan koordinasi antara Penyuluh, Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha yang berfungsi untuk menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian di kecamatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian, BPP dibentuk dan ditetapkan di setiap kecamatan potensi pertanian oleh bupati/walikota dan dikepalai oleh seorang koordinator BPP. BPP melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Camat setempat.

Tugas dan fungsi BPP diimplementasikan dengan penguatan peran BPP sebagai pusat data informasi, pusat gerakan pembangunan, pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis, dan pusat pengembangan jejaring kemitraan. Optimalisasi 5 Peran BPP dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di kecamatan dengan (a) tersedianya data dan informasi; (b) terjalinnya sinergitas kegiatan pembangunan pertanian; (c) terlaksananya pembelajaran usaha tani; (d) terlaksananya konsultasi agribisnis; (e) terlaksananya konsultasi agribisnis. Kabupaten Bekasi sebagai salah satu daerah penghasil beras terbesar di Jawa Barat memiliki tantangan tersendiri dalam mengembangkan sektor pertanian, tantangan tersebut antara lain berkurangnya lahan pertanian, pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, alih fungsi lahan pertanian, tumbuhnya perumahan baru yang tinggi dan lainnya.

Terdapat tantangan disamping adanya potensi pada sektor pertanian di Kabupaten Bekasi yaitu berkurangnya lahan pertanian, pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, alih fungsi lahan pertanian, tumbuhnya perumahan baru yang tinggi dan lainnya. Untuk itu perlu adanya Kajian Optimalisasi Peran Balai Penyuluh Pertanian dalam Pembangunan Pertanian di Kabupaten Bekasi.

Tujuan pelaksanaan Kajian Optimalisasi Peran Balai Penyuluh Pertanian dalam Pembangunan Pertanian di Kabupaten Bekasi adalah teridentifikasinya strategi program dan kegiatan dalam pengembangan Balai Penyuluh Pertanian yang dapat di implementasikan sesuai dengan potensi wilayah kecamatan di Kabupaten Bekasi, sedangkan sasaran yang ingin dicapai terkait pelaksanaan Kajian Optimalisasi Peran Balai Penyuluh Pertanian dalam Pembangunan Pertanian di Kabupaten Bekasi adalah menjadikan Balai Penyuluh Pertanian sebagai pusat pengembangan dan informasi pertanian di Kabupaten Bekasi.

Penyuluhan adalah suatu proses penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan upaya perbaikan dan pembangunan sektor demi tercapainya peningkatan kualitas, produktivitas, dan meningkatnya pendapatan petani dan kesejahteraan keluarganya. Tujuan tersebut akan tercapai dengan adanya suatu proses penyuluhan. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan dalam teknis operasional dan teknis penunjang. Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi: a) Penyusunan program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan Badan; b) Pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; c) Penyebarluasan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar; d) Pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; e) Peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; f) Pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha; g) Pemberian dorongan dan menciptakan kondisi pelaku utama serta kelompok tani untuk menjalin hubungan kemitraan usaha; h) Pelaksanaan teknis fungsional di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; i) Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketatausahaan. Pendekatan kegiatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai pendekatan utama. Pendekatan kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian (Siyoto, 2015). Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menunjang pembahasan kajian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi: a) Metode Pengumpulan Data Primer b) Metode Pengumpulan Data Sekunder Dengan metode instasional.

2. METODE PENELITIAN

Adapun data yang dibutuhkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden melalui wawancara kuesioner, survei secara langsung, atau juga data hasil pengamatan lapangan (observasi). Data sekunder diantaranya yaitu data kondisi eksisting pertanian di Kabupaten Bekasi, inventarisasi Sarana dan Prasarana Balai Penyuluh Pertanian di Kabupaten Bekasi dan data inventarisasi Sumber Daya Manusia Balai Penyuluh Pertanian di Kabupaten Bekasi serta informasi lainnya yang terkait dengan Kajian Optimalisasi Peran Balai Penyuluh Pertanian dalam Pembangunan Pertanian di Kabupaten Bekasi.

2.1 Metode Analisis

Analisis yang digunakan dalam kajian ini meliputi: a) analisis Deskriptif, b) analisis Statistik, c) analisis Validasi Data, d) analisis Kebutuhan Sarana dan Prasaran. Acuan yang digunakan dalam penentuan kriteria dan indikator berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 26 Tahun 2012.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi pada tahun 2022 mencapai 3.214.791 dengan kepadatan per km² sebesar 2.523,62. Wilayah yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Tambun Selatan (10.012,69 jiwa km²), sedangkan yang paling rendah kepadatannya adalah Kecamatan Muaragembong (293,46 jiwa per km²). Laju pertumbuhan penduduk setiap kecamatan di Kabupaten Bekasi mengalami pertumbuhan positif sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk wilayah Kabupaten Bekasi sebesar 1,80 persen.

Lahan pertanian di kabupaten Bekasi terdiri dari lahan pertanian sawah dan lahan pertanian bukan sawah, dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi pada tahun 2022 luas lahan pertanian sawah di Kabupaten Bekasi sebesar 48.048 Ha yang di dominasi oleh lahan pertanian sawah irigasi sebesar 43.133Ha sedangkan luas lahan pertanian non sawah sebesar 36.432 Ha.

Sebagai salah satu wilayah yang berbatasan dengan Ibukota negara, Kabupaten Bekasi memiliki pola penggunaan lahan yang kompleks dan beragam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari beragamnya aktifitas masyarakat dan peruntukan lahan di Kabupaten Bekasi.

Penggunaan lahan di Kabupaten Bekasi didominasi oleh lahan sawah sebesar 59.340,42 Ha atau dengan presentase 46,65% dari luas keseluruhan. Sementara itu luas penggunaan lahan permukiman di Kabupaten Bekasi sebesar 30.451,36 Ha atau 23,93 % dari luas keseluruhan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Bekasi

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Air Danau / Situ	101,08
2	Air Laut	482,51
3	Air Tambak	12.184,12
4	Air Tawar Sungai	244,73
5	Perkebunan	8.054,95
6	Permukiman	30.451,36
7	Sawah	59.340,43
8	Tegalan	16.340,84
	Jumlah	127.388

Sumber: RTRW Kab. Bekasi Tahun 2011-2031

Potensi dan Masalah

Hasil dari pengumpulan data dan informasi yang telah diolah berdasarkan metodologi mengenai potensi dan masalah dalam kajian ini diantaranya:

Tabel 2. Potensi dan Masalah Balai Penyuluh Pertanian

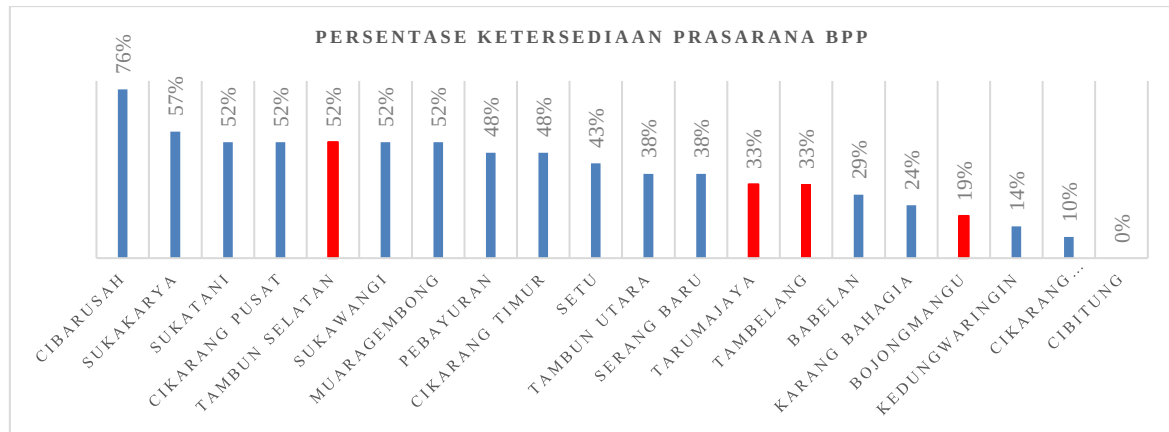
No	Kecamatan	Potensi	Masalah
1	Tarumajaya	• Penghasil bayam terbesar di Kab. Bekasi dengan hasil 10,2 kuintal/tahun	• Kurangnya alat peraga penyuluhan • Meningkatnya hama pada komoditas padi • Sewa lahan yang terlalu mahal
2	Tambelang	• Memiliki potensi pertanian komoditas padi	• Kurangnya sarana dan prarana yang didapatkan oleh penyuluh sehingga terkendala dalam melakukan kegiatan penyuluhan
3	Tambun Selatan	• Memiliki potensi komoditas anggur dan jambu air yang bernilai jual baik di Kab. Bekasi	• Kurangnya SDM tenaga penyuluh pertanian
4	Bojongmangu	• Memiliki potensi pertanian komoditas padi	• Minimnya keterjangkauan sumber air terutama irigasi pada lahan komoditas padi • Harga pupuk yang tidak stabil sehingga menjadi kendala dalam proses pemasaran • Kurangnya SDM tenaga penyuluh pertanian • Kurangnya pengetahuan terhadap penggunaan pupuk pada tanaman padi sehingga penggunaannya belum sesuai anjuran • Kurangnya keterampilan pada petani

Sumber: Hasil Analisa 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata permasalahan Di Kabupaten Bekasi yaitu kurangnya fasilitas baik itu sarana, prasarana atau alsintan dalam dalam kegiatan pertanian, serta minimnya tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) penyuluh pertanian. Akan tetapi disamping itu juga Kabupaten Bekasi memiliki potensi pertanian seperti padi local Pusaka Bhagasasi yang menjadi ciri khas padi dari Kabupaten Bekasi, serta potensi lainnya juga yaitu di bidang hortikultura seperti komoditas kangkung, bayam dan anggur. Potensi tersebut dapat dikembangkan dengan adanya dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat meningkatkan pengembangan pertanian di Kabupaten Bekasi.

Analisis Kebutuhan Prasarana Balai Penyuluh Pertanian

Persentasi optimaslisasi sarana dan prasarana yang ada di masing-masing Balai Penyuluh Pertanian dimana Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Cibusah merupakan Balai Penyuluh Pertanian dengan tingkat optimalisasi Prasarana tertinggi dengan persentase sebesar 76% sedangkan ketersediaan prasarana balai penyuluh pertanian (BPP) yang menjadi lokus utama pada kajian ini diantaranya, Ketersediaan prasarana BPP Kecamatan Tambun Selatan mencapai 52%, Ketersediaan prasarana BPP Kecamatan Tambelang dan BPP Kecamatan Tarumajaya hanya mencapai 33% dan untuk ketersediaan prasarana BPP Kecamatan Bojongmangu hanya 19% dari standar minimal.



Gambar Diagram Persentase Ketersediaan Prasarana BPP

Dapat dilihat pada table berikut keterangan mengenai apasaja kekurangan penyediaan prasarana penunjang peran dan fungsi Balai Penyuluh Pertanian di Kabupaten Bekasi.

Tabel 3. Kebutuhan Prasarana BPP

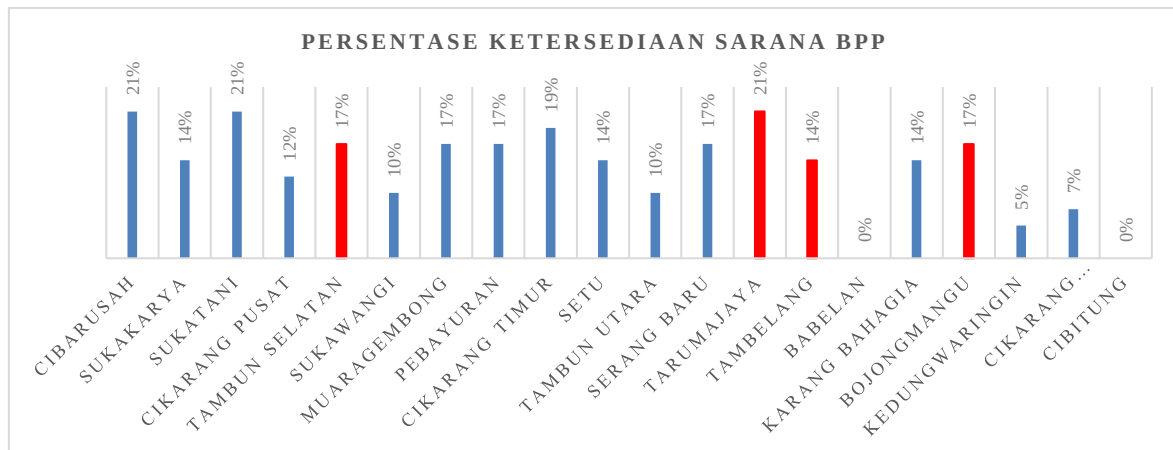
Jenis Prasarana	Kebutuhan Prasarana Kecamatan Tambun Selatan	Kebutuhan Prasarana Kecamatan Bojongmangu	Kebutuhan Prasarana Kecamatan Tambelang	Kebutuhan Prasarana Kecamatan Tarumajaya
Luas lahan	-	Peningkatan luas lahan BPP	Peningkatan luas lahan BPP	Peningkatan luas lahan BPP
bentuk Bangunan	-	Penyesuaian bentuk bangunan gedung	Penyesuaian bentuk bangunan gedung	Penyesuaian bentuk bangunan gedung
Luas Bangunan	Peningkatan luas bangunan Gedung	Peningkatan luas bangunan gedung	Peningkatan luas bangunan gedung	-
1. Koordinator + Ibadah	-	Ruang Kordinator	Ruang Kordinator	Ruang Kordinator
2. Administrasi	-	-	Ruang administrasi	-
3. Kel. Jafung + Konsultasi	Ruang kelompok Jabatan Fungsional	Ruang kelompok Jabatan Fungsional	Ruang kelompok Jabatan Fungsional	Ruang kelompok Jabatan Fungsional
4. Perpustakaan + Audio Visual Aid	-	Ruang Perpustakaan/audio visual/arsip	-	Ruang Perpustakaan/audio visual/arsip
5. Pertemuan/Aula	-	-	Peningkatan Ruang Pertemuan/aula	-
6. Lab Mini + gudang	Ruang Lab dan Gudang	Peningkatan Ruang Lab dan Gudang	Ruang Lab dan Gudang	Ruang Lab dan Gudang
7. Toilet	-	-	Peningkatan ruang kebersihan/toilet	Peningkatan ruang kebersihan/toilet
8. Dapur	Ruang dapur	Ruang dapur	Ruang dapur	Ruang dapur
Pagar Halaman	-	-	-	Pagar halaman BPP
status lahan	-	Status lahan belum dimiliki oleh pemda	-	Status lahan belum dimiliki oleh pemda
Lahan Percontohan	-	Peningkatan Lahan untuk lahan percontohan	-	-
Rumah Dinas	Peningkatan Kondisi Rumah Dinas	Rumah dinas	Rumah dinas	Rumah dinas
Sumber Air Bersih	-	Penyediaan Air Bersih	Penyediaan Air Bersih	-
Sumber Listrik	-	-	-	-
papan nama instansi	-	-	-	-
papan informasi	Papan informasi BPP		Papan informasi BPP	

Sumber: Hasil Analisa 2024

Ditulis dalam satu bab yang sama. Hasil penelitian menyajikan berbagai karakteristik data subjek/sampel dan temuan utama penelitian, sedangkan pembahasan berisi diskusi yang menghubungkan dan membandingkan hasil penelitian dengan teori/konsep/temuan dari hasil penelitian lain menggunakan acuan primer. Pembahasan harus bermakna tidak sekedar menarasikan hasil (tabel dan gambar), serta sebaiknya mengemukakan implikasi dari hasil penelitian.

Analisis Kebutuhan Sarana Balai Penyuluh Pertanian

Analisis kebutuhan sarana pendukung Balai Penyuluh Pertanian dilakukan guna mengoptimalkan peran dan fungsi Balai Penyuluh Pertanian, untuk memenuhi kebutuhan sarana yang diperlukan oleh Balai Penyuluh Pertanian guna dapat melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan penelitian pertanian maka dilakukan Gap Analisis sehingga dihasilkan berapa banyak kekurangan fasilitas sarana yang dibutuhkan Balai Penyuluh Pertanian. Sarana penunjang Balai Penyuluh Pertanian diantaranya alat-alat penyuluhan, alat peraga, dan alat pertanian, dapat dilihat pada table berikut:



Gambar 1. Diagram Persentase Ketersediaan Sarana BPP

Kebutuhan sarana Balai Penyuluh Pertanian (BPP) pada wilayah kajian dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4. Kebutuhan Sarana BPP

No	Kebutuhan Sarana	BPP Tambun Selatan	BPP Bojongmangu	BPP Tambelang	BPP Tarumajaya	Kebutuhan
1.	Komputer	2	3	2	0	7
2.	Printer	2	1	1	1	5
3.	Scanner	0	1	0	0	1
4.	Lemari arsip	0	0	2	2	4
5.	Kalkulator	1	1	1	1	4
6.	Brankas	1	1	1	1	4
7.	Kotak P3K	1	1	1	0	3
8.	Kotak Saran	1	1	1	1	4
9.	Kendaraan	1	0	0	0	1
10.	Laptop	1	1	1	1	4
11.	Alat perekam digital	1	1	1	1	4
12.	Lcd Projector 1 besar 2 mini	1	1	1	1	4
13.	Layar LCD	1	1	1	1	4
14.	Tv monitor LCD	1	0	0	1	2
15.	Sound system 1 besar 2 mini	1	1	1	1	4
16.	WiFi	0	0	0	0	-
17.	Standing board	0	0	0	0	-
18.	Whiteboard	4	2	5	4	15
19.	Specimen	5	5	5	5	20

20.	Benda tiruan	5	5	5	5	20
21.	Soil tester	4	4	5	4	17
22.	Bagan Warna Daun	4	4	3	4	15
23.	Ph Meter	4	4	4	4	16
24.	Alat pengukur curah hujan	4	5	5	5	19
25.	Alat pengukur kadar air	4	5	5	5	19
26.	Tractor roda 2	0	0	0	0	-
27.	Tractor roda 4	0	0	0	0	-
28.	CHK	1	1	1	1	4
29.	CHS	0	0	0	0	-
30.	CHB	0	0	0	0	-
31.	Pompa Air	1	1	1	1	4
32.	Power Thresher	0	0	0	0	-
33.	Rice Transplanter	0	0	0	0	-
34.	Meja	9	9	12	10	40
35.	Kursi	24	68	72	67	231
36.	Rak Buku	4	4	4	4	16
37.	Rak Specimen	4	4	4	4	16

Sumber: Hasil Analisa 2024

Analisis Kebutuhan SDM Balai Penyuluh Pertanian

Salah satu permasalahan Balai Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Bekasi yaitu minimnya SDM diantaranya tenaga penyuluh, maka dilakukan Analisa kebutuhan SDM dengan menggunakan standar minimal SDM pada Balai Penyuluhan Pertanian pada masing-masing Balai Penyuluh Pertanian sesuai dengan rekapitulasi data kebutuhan tenaga penyuluh Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5. Jumlah Kebutuhan Sumber Daya Manusia

No	Jenjang Penyuluh Pertanian	Rekomendasi			Total
		Kab/Kota (Orang)	Kecamatan (Orang)	Desa (Orang)	
1.	Pemula	0	0	7	7
2.	Terampil	0	0	40	40
3.	Mahir	0	0	12	12
4.	Penyelia	0	0	13	13
5.	Pertama	0	31	115	146
6.	Muda	3	25	0	31
7.	Madya	2	8	0	14
	Jumlah	5	64	187	263

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi Tahun 2024

Perumusan Alternatif Arahan Kebijakan

Perumusan Alternatif kebijakan merupakan cara untuk memecahkan suatu masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada dan dari sekian banyak alternatif pemecahan yang ada maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik. Langkah-langkah taktis ini berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pengoptimalan peran balai penyuluhan pertanian dalam pembangunan Kabupaten Bekasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. Persoalan yang dihadapi oleh Balai Penyuluh Pertanian di Kabupaten Bekasi diantaranya:

- Kurangnya sarana prasarana penunjang bagi penyuluh
- Kurangnya SDM tenaga penyuluh pertanian
- Minimnya alat peraga penyuluhan
- Minimnya alat dan mesin pertanian (ALSINTAN)
- Minimnya akses pengairan terhadap lahan pertanian
- Beberapa Balai Penyuluh Pertanian Belum Memiliki Gedung
- Minimnya inovasi petani
- Minimnya ketersediaan pupuk kimia
- Meningkatnya hama pada komoditas pertanian padi
- Harga sewa lahan yang tinggi
- Minimnya anggaran dalam operasional penyuluhan
- Tidak berfungsinya KUD
- Minimnya modal dan investasi bidang pertanian
- Terkendala dalam proses pembelajaran melalui lahan percontohan.
- Kurangnya pengetahuan terhadap penggunaan pupuk pada tanaman padi sehingga penggunaannya belum sesuai anjuran

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu. Rumusan arah kebijakan tersebut nantinya menjadikan pilihan strategi rasional dan konkret sehingga pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan. Berikut ini merupakan arahan kebijakan dalam pengoptimalisasian peranan Balai Penyuluhan Pertanian.

Tabel 6. Perumusan Arahan Kebijakan

No	Alternatif Kebijakan	Strategi
1.	Peningkatan dukungan prasarana dan sarana Penyuluhan Pertanian	Dukungan penyediaan sarana pembelajaran penyuluhan melalui pengadaan mobil penyuluhan keliling Pengadaan sarana, prasarana untuk mendorong peningkatan produksi pertanian Pemanfaatan lahan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan sebagai media pembelajaran penyuluh Pembangunan Gedung/kantor BPP Cibitung, BPP Cikarang Barat, BPP Cikarang Utama sebagai penguatan kelembagaan pertanian
2.	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian baik Penyuluh PNS dan Penyuluh Swadaya	Peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian melalui pelatihan/diklat Bimbingan teknis dan studi banding Uji kompetensi Penyuluh Pertanian Penambahan kuantitas penyuluh sebagai penguatan fungsi penyuluhan Peningkatan pembinaan kepada penyuluh dalam mengatasi berbagai persoalan selama pelaksanaan program penyuluhan
3.	Penyediaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan pertanian dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Bekasi	Meningkatkan kualitas perencanaan dengan melakukan reuvi DIPA awal untuk melihat kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/Output dalam DIPA dengan kebutuhan satker Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan dengan memastikan DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan

	output serta sasaran program/kegiatan, Memastikan seluruh unit kerja melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money) dengan membatasi belanja operasional yang urgensinya rendah
4. Pengembangan dan penyebaran informasi/materi Penyuluhan Pertanian melalui sistem teknologi informasi	Meningkatkan koordinasi antar Lembaga baik internal bpp, antar bpp dan antar Lembaga Penggunaan media sosial dalam penyebaran informasi dan koordinasi Penyebaran informasi dan koordinasi menggunakan komunikasi praktis tanpa bertatapapan langsung Pengolahan data untuk di jadikan sebuah informasi bagi pengguna Penyediaan Sumber Daya Manusia dalam bidang informasi dan komunikasi pertanian
5. Penguatan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan sebagai Pusat Koordinasi Program dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pertanian	Penyuluhan di kecamatan sebagai Pusat Data dan Informasi Pertanian
6. Dukungan kebijakan dalam upaya peningkatan investasi di bidang pertanian	Membangun pemerintahan yang bersih yang bebas dari korupsi, adanya konsistensi, kejelasan dan kepastian kebijakan pemerintah jangka panjang, serta birokrasi yang efisien dari segi waktu dan biaya pengurusan ijin investasi Menciptakan fungsi sektor pembiayaan yang efektif (sistem perbankan dan pasar modal) serta sistem ketenagakerjaan yang kondusif. Khususnya bagi usaha pertanian rakyat, persyaratan perbankan. Menciptakan sistem perpajakan (PPN, PPn, dll) dan prosedur perdagangan ekspor-impor dan perdagangan domestik yang mudah dan sederhana

Sumber: Hasil Analisa 2024

3.2 Pembahasan

Dari hasil proses analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Secara administratif Kabupaten Bekasi memiliki 23 kecamatan dan 180 desa serta 7 kelurahan. Untuk kondisi fisik di Kabupaten Bekasi bila dilihat dari topografi atau kemiringan yaitu berada di dataran rendah dan bergelombang. Kabupaten Bekasi memiliki pola penggunaan lahan yang kompleks dan beragam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari beragamnya aktifitas masyarakat dan peruntukan lahan di Kabupaten Bekasi. Penggunaan lahan di Kabupaten Bekasi didominasi oleh lahan sawah sebesar 59.340,42 Ha atau dengan presentase 46,65% dari luas keseluruhan. Sementara itu luas penggunaan lahan permukiman di Kabupaten Bekasi sebesar 30.451,36 Ha atau 23,93 % dari luas keseluruhan. Pelaksanaan Kajian Optimalisasi Peran Balai Penyuluh Pertanian dalam Pembangunan Pertanian di Kabupaten Bekasi ini dilakukan di wilayah Kabupaten Bekasi, Kecamatan Pebayuran memiliki luas Lahan Baku Sawah terbesar di Kabupaten Bekasi dengan luas 7.465,9 Ha atau sekitar 14% dari luas total Lahan Baku Sawah Kabupaten Bekasi. Balai Penyuluh Pertanian dalam menjalankan peran dan

fungsinya terdapat beberapa permasalahan yaitu diantaranya kurangnya sarana dan prasarana BPP sebagai lembaga dalam pemberdayaan pertanian, minimnya SDM dalam melakukan kegiatan penyuluhan pertanian serta minimnya anggaran dalam kegiatan penyuluhan pertanian sehingga hal tersebut menjadi salah satu factor kurang optimalnya peran dan fungsi BPP dalam Pembangunan Kabupaten Bekasi khususnya dalam bidang pertanian. Untuk meminimalisir permasalahan – permasalahan tersebut maka perlu adanya arahan kebijakan sebagai upaya penguatan Balai Penyuluh Pertanian. Kebijakan dan strategi tersebut memfokuskan pada pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan anggaran penyuluhan, dan dukungan kebijakan yang memudahkan investasi dalam bidang pertanian.

Pemerintah harus lebih memperhatikan program penyuluh pertanian di seluruh Kabupaten Bekasi, peran penyuluh dalam melakukan kegiatan harus bersifat kontinuitas, hal-hal yang harus yang menjadi fokus pengembangan diantaranya sarana dan prasarana, SDM, peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dan biaya atau anggaran sebagai optimalisasi BPP dalam pembangunan daerah Kabupaten Bekasi.

4. KESIMPULAN

Tujuan pelaksanaan Kajian Optimalisasi Peran Balai Penyuluh Pertanian dalam Pembangunan Pertanian di Kabupaten Bekasi adalah teridentifikasinya strategi program dan kegiatan dalam pengembangan Balai Penyuluh Pertanian yang dapat di implementasikan sesuai dengan potensi wilayah kecamatan di Kabupaten Bekasi.

Kesimpulan dari laporan ini sebagai berikut :

1. Secara administratif Kabupaten Bekasi memiliki 23 Kecamatan dan 179 desa serta 8 kelurahan. Kondisi fisik Kabupaten Bekasi bila dilihat dari topografi dan kemiringan berada di dataran rendah dan bergelombang. Penggunaan lahan di Kabupaten Bekasi di dominasi oleh lahan sawah sebesar 59.340,42 Ha atau dengan presentase 46,65% dari luas keseluruhan. Sementara itu luas penggunaan lahan permukiman sebesar 30.451,36 Ha atau 23, 93% dari luas keseluruhan.
2. Kecamatan Pebayuran memiliki luas Lahan Baku Sawah terbesar di Kabupaten Bekasi dengan luas 7.465,9 Ha atau sekitar 4% dari luas total Lahan Baku Sawah Kabupaten Bekasi.
3. Kabupaten Bekasi memiliki padi unggulan khas yang diberi nama Pusaka Bhagasasi, keunggulan pada benih varietas padi lokal Pusaka Bhagasasi ini diantaranya tahan hama, produksi tinggi, tahan rebah serta memiliki masa tanam cepat. Dengan adanya benih lokal ini akan menjadi awal peningkatan produksi padi di Kabuapten Bekasi sebagai upaya dalam mewujudkan ketahanan pangan.
4. Balai Penyuluh Pertanian dalam menjalankan peran dan fungsinya terdapat beberapa permasalahan yaitu diantaranya kurangnya sarana dan prasarana Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sebagai lembaga dalam pemberdayaan pertanian, minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan kegiatan penyuluh pertanian serta minimnya anggaran dalam kegiatan penyuluh pertanian sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor kurang optimal nya peran dan fungsi Balai Penyuluh Pertanian dalam Pembangunan Kabupaten Bekasi khususnya dalam bidang pertanian.
5. Dalam meminimalisir permasalahan-permasalahan tersebut maka perlu adanya arahan kebijakan sebagai upaya penguatan Balai Penyuluh Pertanian. Kebijakan dan strategi tersebut memfokuskan pada pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan anggaran penyuluhan dan dukungan kebijakan yang memudahkan investasi dalam bidang pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan, Pembinaan Dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57). Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/4/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124). Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 514. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Balai Penyuluh Pertanian. Sekretariat Daerah. Kabupaten Bekasi.
- Sri Wahyuni, Helmi, Heri Bachrizal Tanjung, Yenny Oktavia. (2019). Peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Dalam Penyuluhan Komoditi Pangan Studi Kasus Di Kabupaten Tanah Datar. Vol 18 No 2 September 2019.
- Dhea Ayu Resky Amalia, Rahmawati Setiyani, Restie Novitaningrum. (2023). Analisis Kinerja Penyuluh Di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Tawangasari. Jurnal Agribisnis. Surakarta.
- Agoes Thony, Imelda Delima Anggraeni. (2023). Analisis Persepsi Petani Terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian Di Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin. Jurnal Agribisnis. Vol 4 No 1 Juni 2023.
- Irhamyah. (2017). Peranan Balai Penyuluhan Kecamatan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Kelurahan Mampotu Kecamatan Amali Kabupaten Bone. Jurnal Sosial. Makassar.
- Refki, Maulana. (2024, 4 Maret). Pemkab Bekasi Canangkan Varietas Padi Lokal Pusaka Bhagasasi. Diakses pada 20 Maret 2024.
- Fuad, Fauzi. (2023, 1 Febwari). Dalban Daram Resmi Menjadi Buah Mangga Khas Kabupaten Bekasi. Diakses pada 18 Maret 2024.
- Fuad, Fauzi. (2022, 13 September). Padi Khas Unggulan Kabupaten Bekasi Diberi Nama Pusaka Bhagasasi. Diakses pada 19 Maret 2024.